PENGARUH IPM, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA PROVINSI DI PULAU KALIMANTAN

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

FRANSISKUS XAPERIUS DAMAIRI
NIM. B1011211009

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Fransiskus Xaperius Damairi
NIM	:	B1011211009
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	:	Pengaruh IPM,Tingkat Pengangguan Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan pada Provinsi di pulau Kalimantan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA)* dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA)* dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.



nak, 22 September 2026

iskus Xaperius Damairi)
211009

Dipindai dengan CamScanner

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fransiskus Xaperius Damairi
NIM	: B1011211009
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh IPM,Tingkat Pengangguan Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan pada Provinsi di pulau Kalimantan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 22 September 2026

Fransiskus Xaperius Damairi
NIM. B1011211009

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan pada provinsi di pulau Kalimantan

Penanggung Jawab Yuridis

Fransiskus Xaperius Damairi

B1011211009

Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA)	:	13 Agustus 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Muz'an Sulaiman, S.E., M.M., CIQaR. NIP 196108241987031003	4/9/2026	
2.	Pembimbing Pendamping	Eko Supriyanto, S.E., M.E. NIP 199101212019031013	4/9/2026	
3.	Ketua Penguji	Dr. Rosyadi, S.E., M.Si. NIP 196509211993031001	3/9/2026	
4.	Anggota Penguji	Hasanah, S.E., M.E. NIP 199412182024062001	28/8/2026	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 14 SEP 2026

Koordinator Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Yanilo, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

Dipindai dengan CamScanner

FORMULIR PERSETUJUAN
SIDANG TUGAS AKHIR

Dengan ini, Dosen Pembimbing Akademik untuk Tugas Akhir mahasiswa :

Nama	:	Fransiskus Xaperius Damairi
NIM	:	B1011211009
Jurusan	:	Ekonomi Pembangunan
Program Studi	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Judul Proposal	:	Pengaruh IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Pada Provinsi Di Pulau Kalimantan

Menyatakan bahwa Tugas Akhir tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk disidangkan.

Pembimbing Tugas Akhir

Pembimbing Tugas Akhir	Nama	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
Dosen Pembimbing Akademik	Muz'an Sulaiman,S.E., M.M., CIQuR.	9/7/2026	
Dosen Pembimbing Pendamping	Eko Supriyanto, S.E., M.E.	7/7/2026	

Dipindai dengan CamScanner

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasihnya maka penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir yang berjudul "Pengaruh IPM,Tingkat Pengangguan Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan pada Provinsi di pulau Kalimantan" disusun sebagai syarat akademis untuk menyelesaikan program studi Sarjana Ekonomi, sekaligus guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak dan tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, saran, dan masukan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan tugas akhir. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung terutama kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.e., m.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Muz'an Sulaiman, S.E, M.M., CIQaR selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik.
5. Bapak Eko Supriyanto, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing Pendamping saya yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik.
6. Bapak Dr. Rosyadi, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji Pertama saya dalam Seminar Proposal dan Sidang Tugas Akhir yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
7. Ibu Hasanah, S.E., M.E. selaku Dosen Penguji Kedua saya dalam Seminar Proposal dan Sidang Tugas Akhir yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan kepada saya terkhusus Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Seluruh Staff Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan serta seluruh pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang senantiasa membantu dalam proses administrasi demi kelancaran penulisan Tugas Akhir ini.
10. Kepada kedua orang tua tersayang Bapak Kanisius Galang, S.Pd. dan Ibu Marta Budiati, S.Ag., terima kasih untuk waktu yang telah dihabiskan, terima kasih atas

segala doa, kasih sayang, motivasi yang selalu mengiringi setiap langkah saya, serta dukungan moral maupun materi yang selalu diberikan. Gelar sarjana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya.

11. Kepada keempat saudara kandung saya Lorensius Mario Geri, S.H., Siska Monika Handayani, S.Pd., Agustini Elisabet, S.K.M., Fransiskus Xaperius Dekoris, S.H. yang telah mendukung serta memberikan doa dan semangat hingga saya bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Kepada keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu ucapan terimakasih atas dukungan sehin sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Kepada patner penulis, terimakasih sudah menemani penulis dari awal penulisan sampai selesai. Siap mendengarkan keluh kesah penulis, meluangkan waktu serta memberi dukungan penuh kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. (B1012211029)
14. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan Namanya satu per satu yang telah berkontribusi dalam membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
15. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, meski melalui banyak rintangan, lelah, dan keraguan. Terima kasih karena tetap berusaha hingga akhirnya Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Terima kasih telah berhasil menyelesaikan tanggungjawab ini sampai akhir. Tidak banyak yang benar-benar memahami prosesnya, namun setiap usaha, pengorbanan, dan kondisi yang sempat menghambat telah berhasil dilalui hingga titik ini. Semoga diri ini selalu kuat menghadapi perjalanan berikutya.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Jika kemudian hari ada kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan penulisan ini penulis meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan

Pontianak, 22 September 2026

Fransiskus Xaperius Damairi

NIM. B1011211009

PENGARUH IPM, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA PROVINSI DI PULAU KALIMANTAN

[1]Fransiskus Xaperius Damairi
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi memiliki tujuan guna memperluas aktivitas perekonomian dalam sebuah Sektor sehingga mampu meningkatkan pendapatan perkapita dan mencapai kondisi hidup yang lebih baik dalam sebuah sektor. Tetapi, pada pelaksanaannya pembangunan ekonomi sering kali menghadapi permasalahan, salah satunya adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks Pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka serta pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi di pulau Kalimantan. Menggunakan metode kuantitatif dengan regresi data panel melalui REM pada *software Eviews 12*. Hasil penelitian secara parsial mengidentifikasi bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif serta tidak signifikan terhadapketimpangan pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh negartif serta tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara simultan IPM, TPT, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi di pulau Kalimantan.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertu,nuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan

PENGARUH IPM, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA PROVINSI DI PULAU KALIMANTAN

[1]Fransiskus Xaperius Damairi

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi memiliki tujuan guna memperluas aktivitas perekonomian dalam sebuah Sektor sehingga mampu meningkatkan pendapatan perkapita dan mencapai kondisi hidup yang lebih baik dalam sebuah sektor. Tetapi, pada pelaksanaannya pembangunan ekonomi sering kali menghadapi permasalahan, salah satunya adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan antarwilayah (*regional disparity*) muncul akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak merata, di mana terdapat kesenjangan antar wilayah yang sudah berkembang dengan wilayah yang tergolong tertinggal (Zusanti et al., 2020). Ketimpangan pendapatan menggambarkan keadaan ketika terjadinya penyaluran pendapatan yang tidak merata dalam pada masyarakat. Semakin besar tingkat ketimpangan, semakin timpang pula pembagian pendapatan antar kelompok masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan semakin besarnya jarak antar golongan masyarakat dengan penghasilan tinggi dengan masyarakat dengan penghasilan rendah. Rasio Gini memiliki rentang nilai antara 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, Rasio Gini memperlihatkan tingkat ketimpangan yang semakin besar. Kondisi ketika setiap orang memiliki pendapatan yang sama menunjukan bahwa nilai Rasio Gini berada pada nilai 0. Sedangkan, kondisi dimana satu orang memiliki kemampuan untuk membeli segala sesuatu namun orang-orang di sekitarnya cenderung tidak mampu membeli barang yang sama menandakan bahwa terjadinya tingkat ketimpangan sempurna dimana Rasio Gininya bernilai 1.

Pembangunan ekonomi memiliki tujuan guna memperluas aktivitas perekonomian dalam sebuah Sektor sehingga mampu meningkatkan pendapatan perkapita dan mencapai kondisi hidup yang lebih baik dalam sebuah sektor. Tetapi, pada pelaksanaannya pembangunan ekonomi sering kali menghadapi permasalahan, salah satunya adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan antarwilayah (*regional disparity*) muncul akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak merata, di mana terdapat kesenjangan antar wilayah yang sudah berkembang dengan wilayah yang tergolong tertinggal (Zusanti et al., 2020). Ketimpangan pendapatan menggambarkan keadaan ketika terjadinya penyaluran pendapatan yang tidak merata dalam pada masyarakat. Semakin besar tingkat ketimpangan, semakin timpang pula pembagian pendapatan antar kelompok masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan semakin besarnya jarak antar golongan masyarakat dengan penghasilan tinggi dengan

masyarakat dengan penghasilan rendah. Rasio Gini memiliki rentang nilai antara 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, Rasio Gini memperlihatkan tingkat ketimpangan yang semakin besar. Kondisi ketika setiap orang memiliki pendapatan yang sama menunjukan bahwa nilai Rasio Gini berada pada nilai 0. Sedangkan, kondisi dimana satu orang memiliki kemampuan untuk membeli segala sesuatu namun orang-orang di sekitarnya cenderung tidak mampu membeli barang yang sama menandakan bahwa terjadinya tingkat ketimpangan sempurna dimana Rasio Gininya bernilai 1.

2. Permasalahan

1) Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan pada provinsi di Pulau Kalimantan?
2) Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan pada provinsi di Pulau Kalimantan?
3) Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan pada provinsi di Pulau Kalimantan?

3. Tujuan Penelitian

1) Untuk menguji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan pada provinsi di Pulau Kalimantan.
2) Untuk menguji pengaruh Tingkat Pengangguran terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan pada provinsi di Pulau Kalimantan.
3) Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan pada provinsi di Pulau Kalimantan.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metodologi ilmiah yang memprioritaskan investigasi data numerik. Penulisan ini menggunakan data panel, yaitu sintesis data deret waktu dan data lintas sektoral, yang mencakup periode 2015 hingga 2024 di lima provinsi di pulau Kalimantan, menghasilkan total 50 observasi. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari situs web resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada ketimpangan pendapatan di lima provinsi di Kalimantan.

5. Pembahasan

1) Berdasarkan hasil yang diperoleh Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi di pulau Kalimantan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi pada IPM menyebabkan angka ketimpangan pendapatan cenderung menurun. Hal ini dapat dijelaskan karena peningkatan IPM menunjukan perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak, sehingga membuka peluang yang lebih merata bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Ketika ketiga aspek tersebut mengalami perbaikan, maka kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan juga menjadi lebih terbuka dan lebih merata, sehingga distribusi pendapatan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi mulai menyebar ke lapisan masyarakat yang lebih luas. . Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Yoertiara pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan pada provinsi di pulau Kalimantan.
2) Berdasarkan hasil penelitaian yang diperoleh Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi di pulau Kalimantan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kenaikan tingkat pengangguran cenderung diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan, namun hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik. Secara teoritis, tingginya pengangguran dapat memperlebar kesenjangan karena sebagian masyarakat tidak memperoleh pendapatan, sementara kelompok yang bekerja tetap mendapatkan penghasilan, sehingga distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Namun, ketidaksignifikanan hasil ini mengindikasikan bahwa pengangguran bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik ekonomi Kalimantan yang didominasi sektor informal dan berbasis sumber daya alam, di mana masyarakat yang tidak bekerja di sektor formal masih memiliki alternatif sumber penghasilan, sehingga dampak pengangguran terhadap ketimpangan menjadi relatif kecil. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh (Rara, 2024) yang juga menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya peningkatan pengangguran cenderung diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan, tetapi hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk dijadikan kesimpulan yang pasti.
3) Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi di pulau Kalimantan. Hal ini menunjukan bahwa kanaikan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi diikuti oleh penurunan terhadap ketimpangan

pendapatan, namun pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik. Menurut teori, laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan rakyat, sehingga kemungkinan mengurangikesenjangan distribusi pendapatan. Namun, hasil ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum tersebar merata ke semua lapisan masyarakat di Kalimantan. Hal ini dapat disebabkan oleh struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor tertentu, seperti sumber daya alam, yang manfaatnya lebih terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Selain itu, distribusi hasil pertumbuhan yang belum merata serta keterbatasan akses sebagian masyarakat terhadap peluang ekonomi menyebabkan dampak pertumbuhan terhadap penurunan ketimpangan menjadi tidak terlalu kuat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Anggraini, 2024), yang juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan, tetapi hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk dijadikan kesimpulan yang pasti.

6. Kesimpulan

1) Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi di pulau Kalimantan. Artinya, semakin tinggi nilai IPM maka tingkat ketimpangan pendapatan cenderung menurun. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia, yang tercermin dari pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, secara nyata mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.
2) Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi di pulau Kalimantan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peningkatan tingkat pengangguran cenderung diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan, namun hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik.
3) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi di pulau Kalimantan. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan, namun pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR xvi

1. PENDAHULUAN 2

2. KAJIAN LITERATUR 8

2.1 Ketimpangan Pendapatan 8

2.2 Indeks Pembangunan Manusia 8

2.4 Pertumbuhan Ekonomi 9

2.5 Hubungan Antar Variabel 10

2.6 Tinjauan Empiris 11

2.7 Kerangka Konseptual 12

3. METODE PENELITIAN 13

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 13

3.2 Sumber Data 13

3.3 Variabel Penelitian dan Variabel Oprasional 13

3.4 Metode Analisis 14

3.5 Model Estimasi Data Panel 15

3.6 Pemilihan Model Estimasi Data Panel 15

3.7 Uji Statistik 16

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 17

4.1 Hasil Penelitian 18

4.2 Pembahasan Penelitian 22

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 25

5.1 Kesimpulan 25

5.2 Rekomendasi.....26

DAFTAR PUSTAKA 27

LAMPIRAN …….....30

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Gini ratio 5 Provinsi di pulau Kalimantan tahun 2015-2024 4
Tabel 2 Indeks Pembangunan Manusia 5 Provinsi di pulau Kalimantan 5
Tabel 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 5 provinsi di pulau Kalimantan 6
Tabel 4 Pertumbuhan Ekonomi 5 provinsi di pulau Kalimantan 7
Tabel 5 Definisi Oprasional Variabel.....133
Tabel 6 Hasil Uji Model Regresi.....188
Table 7 Hasil Uji Regresi Lineier Berganda 189
Tabel 8 Hasil Uji t-statistik.....221
Tabel 9 Hasil Uji F-statistik 22
Table 10 Uji Koefisien Deterinasi (R^2).....22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gini ratio Indonesia tahun 2015-2024 3

PENGARUH IPM, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA PROVINSI DI PULAU KALIMANTAN

[1]Fransiskus Xaperius Damairi
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

Economic development aims to expand economic activity in a sector, thereby increasing per capita income and achieving better living conditions in a sector. However, in its implementation, economic development often faces problems, one of which is inequality in income distribution. This study aims to analyze the influence of the Human Development Index, the open unemployment rate, and economic growth on income inequality in provinces on the island of Kalimantan. Using a quantitative method with panel data regression through REM in Eviews 12 software. The results of the study partially identified that the Human Development Index had a negative and significant effect on income inequality. The open unemployment rate had a positive and insignificant effect on income inequality, and economic growth had a negative and insignificant effect on income inequality. Simultaneously, the Human Development Index, the Open Unemployment Rate, and Economic Growth had a significant effect on income inequality in provinces on the island of Kalimantan.

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi memiliki tujuan guna memperluas aktivitas perekonomian dalam sebuah Sektor sehingga mampu meningkatkan pendapatan perkapita dan mencapai kondisi hidup yang lebih baik dalam sebuah sektor. Tetapi, pada pelaksanaannya pembangunan ekonomi sering kali menghadapi permasalahan, salah satunya adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks Pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka serta pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi di pulau Kalimantan. Menggunakan metode kuantitatif dengan regresi data panel melalui REM pada *software Eviews 12*. Hasil penelitian secara parsial mengidentifikasi bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif serta tidak signifikan terhadapketimpangan pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh negartif serta tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara simultan IPM, TPT, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi di pulau Kalimantan.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertu,nuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan

[1]b1011211009@student.untan.ac.id

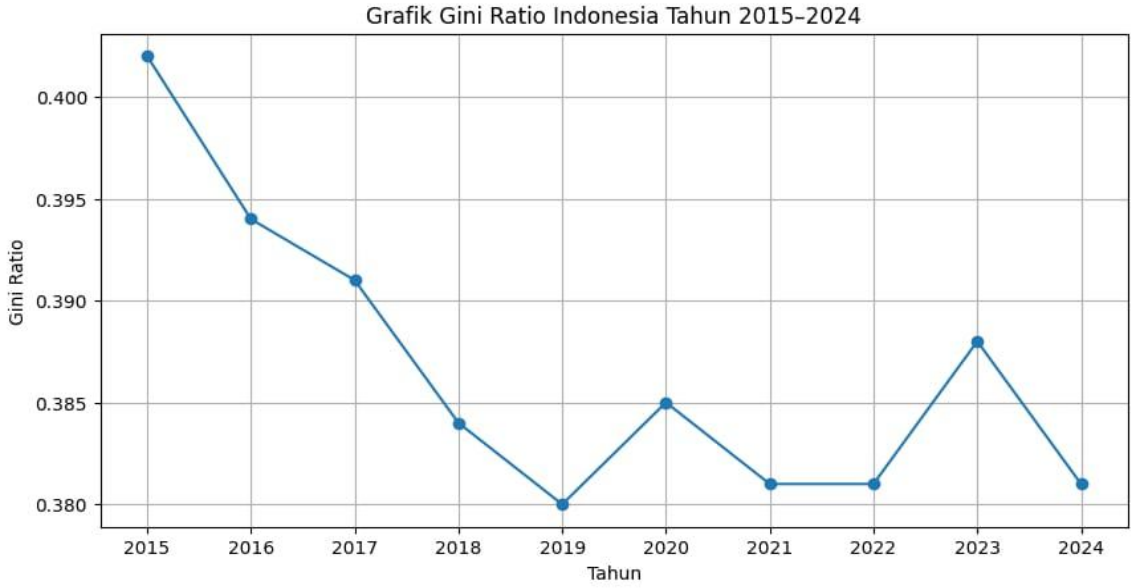
1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi memiliki tujuan guna memperluas aktivitas perekonomian dalam sebuah Sektor sehingga mampu meningkatkan pendapatan perkapita dan mencapai kondisi hidup yang lebih baik dalam sebuah sektor. Tetapi, pada pelaksanaannya pembangunan ekonomi sering kali menghadapi permasalahan, salah satunya adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan antarwilayah (*regional disparity*) muncul akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak merata, di mana terdapat kesenjangan antar wilayah yang sudah berkembang dengan wilayah yang tergolong tertinggal (Zusanti et al., 2020). Ketimpangan pendapatan menggambarkan keadaan ketika terjadinya penyaluran pendapatan yang tidak merata dalam pada masyarakat. Semakin besar tingkat ketimpangan, semakin timpang pula pembagian pendapatan antar kelompok masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan semakin besarnya jarak antar golongan masyarakat dengan penghasilan tinggi dengan masyarakat dengan penghasilan rendah. Rasio Gini memiliki rentang nilai antara 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, Rasio Gini memperlihatkan tingkat ketimpangan yang semakin besar. Kondisi ketika setiap orang memiliki pendapatan yang sama menunjukan bahwa nilai Rasio Gini berada pada nilai 0. Sedangkan, kondisi dimana satu orang memiliki kemampuan untuk membeli segala sesuatu namun orang-orang di sekitarnya cenderung tidak mampu membeli barang yang sama menandakan bahwa terjadinya tingkat ketimpangan sempurna dimana Rasio Gininya bernilai 1.

Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat pengangguran terbuka dan Pertumbuhan ekonomi adalah beberapa penyebab yang dapat mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan. Indekas Pembangunan manusia adalah bentuk investasi penting dalam meningkatkan kualitas manusia dimana tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh besarnya investasi pada sumber daya manusia (Schultz, 1961). Menurut teori Lewis (1959) dalam (Mulyadi, 2014), TPT berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan karena jika faktor modern tidak mampu menyerap perpindahan tenaga kerja dari faktor subsisten, maka pengangguran terbuka akan meningkat dan menyebabkan terjadinya ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dan ketimpangan pendapatan semakin besar. Menurut Kuznets dalam (Firmansyah, 2021) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mengurangi tingkat ketimpangan setelah mencapai ambang batas tertentu yang dikenal sebagai titik balik.

Di Indonesia sendiri fenomena ketimpangan pendapatan menjadi persoalan yang cukup serius, karena dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan ,akses terhadap pendidikan dan hingga kesempatan kerja dan kesejahteraan sosial secara umum. Ketimpangan ini juga berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin lebar antara kelompok masyarakat, sehingga diperlukan perhatian dan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak untuk menciptakan pemerataan yang lebih baik.

Gambar 1 Gini ratio Indonesia tahun 2015-2024



Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2025)

Berdasarkan gambar 1 data Gini Ratio Indonesia tahun 2015–2024, menunjukan bahwa secara umum tingkat ketimpangan pendapatan cenderung menurun, dari 0,402 % pada tahun 2015 menjadi 0,381 % pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan, yang mengindikasikan bahwa kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah semakin mengecil. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi, seperti program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, serta pembangunan di berbagai wilayah. Meskipun demikian, nilai Gini Ratio Indonesia masih berada pada kategori ketimpangan sedang, sehingga upaya pemerataan tetap perlu ditingkatkan.

Namun, dalam periode tersebut juga terlihat adanya masalah berupa fluktuasi nilai Gini Ratio yang menunjukkan bahwa penurunan ketimpangan belum berlangsung secara konsisten. Setelah mengalami penurunan hingga tahun 2019, angka Gini Ratio sempat meningkat pada 2020, kemudian kembali menurun dan relatif stabil, namun naik lagi pada 2023 sebelum akhirnya turun kembali pada 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Indonesia belum menunjukan kestabilan dan dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berkelanjutan dan lebih tepat sasaran agar ketimpangan pendapatan dapat terus ditekan dan tidak mengalami kenaikan kembali di masa mendatang.

Pada Provinsi di pulau Kalimantan, tingkat ketimpangan pendapatan memperlihatkan tren yang cenderung menurun selama periode pengamatan. Meskipun

terjadinya fluktuasi dari dari tahun ke tahun, namun dapat dilihat bahwa adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan di wilayah tersebut secara keseluruhan. Perubahan ini mencerminkan dinamika pembangunan ekonomi yang terjadi pada setiap provinsi di Pulau Kalimantan.

Tabel 1 Gini ratio 5 Provinsi di pulau Kalimantan tahun 2015-2024

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kalbar	0,33	0,331	0,329	0,325	0,318	0,325	0,315	0,311	0,321	0,314
2.	Kalteng	0,3	0,347	0,327	0,344	0,335	0,32	0,32	0,309	0,317	0,304
3.	Kalsel	0,334	0,351	0,347	0,34	0,334	0,351	0,325	0,309	0,313	0,298
4.	Kaltim	0,315	0,328	0,333	0,342	0,335	0,335	0,331	0,317	0,322	0,31
5.	Kaltara	0,314	0,305	0,313	0,304	0,292	0,3	0,285	0,27	0,277	0,259

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2025)

Berdasarkan tabel 1 data Gini Ratio pada provinsi-provinsi yang ada Pulau Kalimantan selama jangka waktu tahun 2015 sampai 2024, secara umum seluruh wilayah mengalami tren penurunan ketimpangan pendapatan. Angka Gini Rasio di masing-masing provinsi masih berada pada kisaran 0,30 % hingga 0,33 % pada 2015, yang memperlihatkan tingkat ketimpangan menengah. Sepanjang satu dekade, setiap provinsi memperlihatkan pergerakan fluktuatif namun dengan arah yang cenderung menurun. Pada tahun 2016 Kalimantan Barat menunjukan angka yang relatif stabil dengan nilai antara 0,331 % kemudian turun menjadi 0,314 % di tahun 2024, menggambarkan adanya pemerataan pendapatan yang perlahan membaik. Terjadinya penurunan yang cukup nyata di Kalimantan Tengah pada tahun 2016 di angka 0,347 % menjadi 0,304 % pada tahun 2024, memperlihatkan perbaikan distribusi pendapatan yang cukup signifikan. Kalimantan Selatan juga memperlihatkan pola serupa, di mana pada tahun 2015 berada diangka 0,334 % menjadi 0,298 % pada tahun 2024, meskipun pada tahun 2020 terjadi peningkatan akibat adanya pandemi pada struktur pendapatan. Sementara itu, Kalimantan Timur cenderung stabil di kisaran 0,31 % hingga 0,34 % dengan sedikit penurunan dari 0,342 % pada 2018 menjadi 0,310 % pada 2024, menandakan ketimpangan yang mulai berkurang meskipun perubahannya tidak terlalu besar. Kalimantan Utara memperlihatkan penurunan yang paling berkelanjutan dan substansial, menurun dari 0,314 % pada tahun 2015 menjadi

0,259 % pada tahun 2024, sehingga menempatkan dirinya sebagai provinsi dengan peningkatan terbesar dalam ketipangan pendapatan di antara semua wilayah Kalimantan. Penurunan Rasio Gini di Kalimantan memperlihatkan jika inisiatif yang bertujuan untuk kesetaraan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat membuahkan hasil yang menguntungkan, meskipun ketimpangan antar wilayah masih berada pada tingkat moderat dan memerlukan fokus pada kebijakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah metrik yang digunakan untuk menilai kesejahteraan dan kualitas hidup dalam suatu masyarakat. Indeks ini dievaluasi berdasarkan tiga variabel utama: kesehatan, yang ditunjukkan oleh harapan hidup; pendidikan, yang diukur dengan perkiraan tahun sekolah dan rata-rata tahun sekolah; dan tingkat kehidupan yang memuaskan. Produktivitas penduduk di pengaruhi oleh tinggi atau rendahnya tingkat IPM. Rendahnya produktivitas penduduk menandakan nilai IPM yang semakin menurun dan mengakibatkan rendahnya pendapatan. Sebaliknya, produktivitas penduduk yang semakin tinggi menandakan nilai IPM semakin besar, sehingga pendapatan masyarakat semakin meningkat. Isu yang muncul adalah perbedaan nilai IPM di berbagai wilayah, menjadikan IPM sebagai penentu penting yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di antara wilayah-wilayah tersebut (Islami & SBM, 2018).

Tabel 2 Indeks Pembangunan Manusia 5 Provinsi di pulau Kalimantan

No.	Provinsi	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1.	Kalbar	70,13	69,41	68,63	67,9	67,66	67,65	66,98	66,26	65,88	65,59
2.	Kalteng	72,73	72,2	71,63	71,25	71,05	70,91	70,42	69,79	69,13	68,53
3.	Kalsel	73,03	72,5	71,84	71,28	70,91	70,72	70,17	69,65	69,05	68,38
4.	Kaltim	78,83	78,2	77,44	76,88	76,24	76,61	75,83	75,12	74,59	74,17
5.	Kaltara	73,02	72,49	71,83	71,19	70,63	71,15	70,56	69,84	69,2	68,76

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2024)

Berdasarkan table 2 data tahun 2015–2024, pada seluruh provinsi di pulau Kalimantan menunjukan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang konsisten, mencerminkan kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan IPM ini menandakan bahwa upaya pembangunan manusia di Kalimantan berlangsung secara berkelanjutan dan merata meskipun dengan kecepatan yang berbeda

antarprovinsi. Kalimantan Timur memiliki IPM tertinggi pada tahun 2015 diangka 74,17 menjadi 79,50 pada tahun 2024, memperlihatkan kemajuan signifikan dalam aspek pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Diikuti oleh Kalimantan Utara dengan IPM sebesar 77,12, Kalimantan Selatan 76,00, Kalimantan Tengah 75,30 dan Kalimantan Barat yang berada di posisi terendah dengan 72,75. Rata-rata peningkatan IPM di Pulau Kalimantan mencapai sekitar 0,6 per tahun, menandakan adanya kemajuan yang stabil dalam pembangunan manusia. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta memperbaiki taraf hidup masyarakat melalui peningkatan daya beli. Secara keseluruhan, kualitas sumber daya manusia yang terus membaik menunjukan bahwa IPM di Kalimantan mengalami tren kenaikan dimana hal ini berpotensi mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif di masa depan.

Variabel berikutnya yang turut mempengaruhi ketimpangan adalah tingkat pengangguran. Adanya sumber daya produksi yang belum dimanfaatkan dengan maksimal guna mendukung proses pembangunan menunjukan bahwa angka pengangguran di sejumlah provinsi tergolong tinggi (Zusanti et al., 2020). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat timbul dari ketidakseimbangan antara jumlah posisi yang tersedia dan besarnya angkatan kerja, sehingga membatasi prospek pekerjaan. Proporsi individu yang menganggur dibandingkan dengan angkatan kerja disebut sebagai TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (SAKERNAS, 2023).

Tabel 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 5 provinsi di pulau Kalimantan

No.	Provinsi	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1.	Kalbar	4,86	5,05	5,11	5,82	5,81	4,35	4,18	4,36	4,23	5,15
2.	Kalteng	4,01	4,1	4,26	4,53	4,58	4,04	3,91	4,23	4,82	4,54
3.	Kalsel	4,2	4,31	4,74	4,95	4,74	4,18	4,35	4,77	5,45	4,92
4.	Kaltim	5,14	5,31	5,71	6,83	6,87	5,94	6,41	6,91	7,95	7,5
5.	Kaltara	3,9	4,01	4,33	4,58	4,97	4,49	5,11	5,54	5,23	5,68

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa secara umum seluruh provinsi mengalami tren penurunan angka pengangguran. Rata-rata TPT tertinggi terjadi di Kalimantan Timur sebesar 6,46 % dengan penurunan signifikan pada tahun 2015 diangka 7,50 % menjadi 5,14 % pada

tahun 2024, sementara Kalimantan Tengah mencatat rata-rata terendah sebesar 4,30 % dengan kondisi yang relatif stabil. Secara keseluruhan, tingkat pengangguran di wilayah Kalimantan memperlihatkan perbaikan yang positif. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu wilayah menandakan efektivitas pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Kondisi sosial yang membaik menandakan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan. Menurut Todaro (2002) dalam (Mahendra, 2016), pertumbuhan ekonomi dicirikan sebagai peningkatan berkelanjutan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan dan memenuhi kebutuhan ekonomi penduduknya dalam jangka waktu yang panjang. Perkembangan ini dilihat dari perkembangan atau pengoptimalan dalam bidang teknologi, kelembagaan, serta ideologi sesuai dengan dinamika dan tuntutan situasi yang berkembang.

Tabel 4 Pertumbuhan Ekonomi 5 provinsi di pulau Kalimantan

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kalbar	4,88	5,2	5,17	5,07	5,09	1,82	4,8	5,07	4,46	4,9
2.	Kalteng	7,01	6,35	6,73	5,61	6,12	1,41	3,59	6,45	4,14	4,46
3.	Kalsel	3,82	4,4	5,28	5,08	4,09	1,82	3,48	5,11	4,84	5,05
4.	Kaltim	-1,2	0,38	3,13	2,64	4,7	2,9	2,55	4,48	6,22	6,17
5.	Kaltara	3,4	3,55	6,8	5,36	6,89	1,09	3,99	5,32	4,94	4,57

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2026)

Berdasarkan table 4 data pertumbuhan ekonomi di lima provinsi pada Pulau Kalimantan selama periode 2015–2024, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan di setiap wilayah. Secara umum, tren pertumbuhan sempat menurun tajam di periode 2020–2021 dikarenakan dampak pandemi COVID-19, namun kembali memperlihatkan pemulihan sejak tahun 2022 hingga 2024. Kalimantan Barat memperlihatkan pertumbuhan yang relatif stabil dengan kisaran 4–5 %, meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 (-1,82%). Setelah pandemi, pertumbuhan kembali meningkat menjadi 4,9% pada 2024, memperlihatkan pemulihan ekonomi yang cukup baik. Kalimantan Tengah memiliki kinerja yang cukup kuat, terutama di awal periode dengan angka tertinggi 7,01% pada 2015, meskipun sempat menurun tajam hingga -1,41% pada 2020. Namun, provinsi ini berhasil bangkit dengan pertumbuhan 4,46% pada 2024, menandakan daya tahan ekonomi yang baik. Kalimantan Selatan juga memperlihatkan pola yang mirip, yaitu pertumbuhan positif sebelum pandemi (5,28% pada 2017) kemudian turun ke -1,82% pada

2020, dan kembali meningkat menjadi 5,05% pada 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja sektor industri dan perdagangan. Sementara itu, Kalimantan Timur mencatat pertumbuhan paling fluktuatif dengan nilai negatif pada 2015 dan 2016 (-1,2% dan -0,38%) yang kemungkinan disebabkan oleh penurunan harga komoditas migas, sektor utama provinsi ini. Namun, setelah 2020, pertumbuhannya meningkat tajam hingga mencapai 6,17% pada 2024, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Kalimantan pada tahun tersebut. Adapun Kalimantan Utara secara konsisten memperlihatkan tren positif, dengan pertumbuhan cukup tinggi pada 2017 sebesar 6,8%, dan tetap stabil setelah pandemi dengan nilai 4,57% pada 2024. Secara garis besar, data menjelaskan bahwa ekonomi pada wilayah Kalimantan telah menunjukan pemulihan pascapandemi dan memperlihatkan arah yang positif.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk menaikan taraf hidup masyarakat melalui pemerataan pendapatan serta peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya, ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah seringkali menjadi tantangan dalam pembangunan. Ketimpangan ini disebabkan berbagai faktor seperti perbedaan akses pada peluang ekonomi, ketidakmerataan kesempatan kerja, perbedaan kepemilikan aset, serta dampak guncangan ekonomi yang lebih berat dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah. Selain itu, tingkat pengangguran dan ketimpangan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan faktor penentu yang mempengaruhi ketimpangan antarwilayah.

Di pulau Kalimantan, meskipun terdapat variasi antar provinsi, tren ketimpangan pendapatan memperlihatkan peningkatan, yang menandakan kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berkualitas tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi; tetapi juga bergantung pada distribusi yang adil dari keuntungan pembangunan di antara semua kelompok masyarakat.